

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu penting sejak era reformasi hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan dari masyarakat agar pemerintah terus melakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Rahmawati dkk. (2018) upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan untuk menentukan beberapa keberhasilannya dalam menjalankan mandatnya (Indrayani, 2020). Pemenuhan kriteria kualitas laporan keuangan memungkinkan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Setiyawati & Doktoralina (2019) menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang dimuat dalam LKPD memenuhi kriteria karakteristik kualitatif LKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

LKPD yang berkualitas dapat dilihat dari sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah organisasi yang berkeinginan untuk mempelajari dan menilai LKPD. Terdapat 4 (empat) tingkatan penilaian yang membentuk opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Jika BPK memberikan opini yang luas tanpa menganalisis suatu laporan keuangan tertentu, hal ini menunjukkan bahwa laporan tersebut menurunkan standar kualitas dan telah direview dan dibahas secara jelas (Mahardini & Miranti, 2018).

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pendapat BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023

Entitas	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Demak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: jateng.bpk.go.id, 2025

Berdasarkan informasi pada Tabel 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak selama delapan tahun berturut-turut memperoleh opini WTP. Menurut informasi yang bersumber dari (www.finance.detik.com, 2018), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa rekomendasi WTP yang diberikan oleh BPK untuk laporan keuangan dari badan usaha atau lembaga hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa proses telah diselesaikan sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, WTP tidak menjamin bahwa suatu lembaga tertentu bebas dari korupsi atau boros dalam hal mengevaluasi anggaran.

Laporan hasil audit nomor 700/001/WIL IV/DAMFAS/2023 BPK Tahun 2023 atas LKPD Kab. Demak menunjukkan bahwa terdapat catatan antara lain dugaan

penyimpangan pendapatan retribusi parkir tahun 2022 yang dikelola oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan di Kab. Demak dengan total Rp 456.300.000 yang belum disetor sehingga menyisakan piutang (buku opini BPK tahun 2023, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan pada karakteristik kualitatif laporan keuangan andal. Karena informasi yang disajikan pada LKPD belum menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa secara wajar. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi hasil audit BPK atas laporan kewajaran keuangan LKPD Kabupaten Demak, namun apabila tidak segera ditangani, dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun mendatang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan suatu proses krusial yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaporan keuangan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan-undangan. SPIP yang bermutu tinggi akan meningkatkan mutu laporan keuangan OPD. Selain itu diperlukan SDM yang memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsinya di tingkat individu, organisasi, dan sistem untuk mencapai tujuan mereka secara efisien dan efektif (Samosir & Setiyawati, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi juga berdampak pada kualitas laporan keuangan. Teknologi yang digunakan adalah pemanfaatan komputer akuntansi untuk pengelolaan keuangan pemerintah dan daerah (Laoli & Mukti, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengatur tentang persyaratan penggunaan teknologi informasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Diperlukan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan akurat agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wibowo, 2022). Jika terjadi kekurangan penggunaan teknologi informasi selama masa transisi, kualitas laporan keuangan dapat menurun (Pratama, 2019).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gasperz (2019) menjelaskan bahwa SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatinur (2023) menjelaskan bahwa SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus teknologi informasi dapat memediasi hubungan antara kompetensi SDM dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini berfokus dengan memadukan SPIP, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah disarankan untuk terus berinvestasi dalam pelatihan SDM, memperkuat sistem internal, serta mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam proses pelaporan keuangan (Helmy & Silviana, 2024).

Objek penelitian ini adalah BPKPAD Kabupaten Demak. BPKPAD digambarkan sebagai organisasi yang didedikasikan untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Demak. Ada perbedaan antara temuan penelitian sebelumnya berdasarkan uraian yang disebutkan di atas. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali dampak SPIP dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pembaharuan penelitian ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening. Penelitian ini

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Gasperz (2019).

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori ini menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1991). Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non profit lainnya. Organisasi sektor publik pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dan *principals* yang tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan untuk kepentingan organisasi (Kholifah, 2020).

Hubungan antara *stewardship* yang diteorikan dan ditunjukkan dalam studi ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah (*stewards*) adalah organisasi yang dapat diandalkan oleh masyarakatnya (*principals*). Pemerintah daerah harus memenuhi kewajibannya, menjalankan fungsinya dengan baik, agar dapat beroperasi demi kebaikan publik, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya, dan mewajibkan akuntabilitas agar tujuan lembaga pemerintah dapat tercapai semaksimal mungkin (Azzahro dkk, 2023).

2.1.2 SPIP

SPIP merupakan proses penting yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh seluruh pegawai untuk menyediakan sarana pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60, 2008). Landasan dari Peraturan Pemerintah ini adalah adanya satu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat menerapkan praktik tata pemerintahan yang baik di sektor publik (Lisnawati, 2021).

Terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedural yang direncanakan dan dilaksanakan oleh *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* berfungsi sebagai pengingat bahwa tujuan pengembangan manajemen dapat tercapai. Berikut adalah komponen utama SPIP:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan pengendalian intern.

2.1.3 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang atau individu untuk menjalankan fungsi atau wewenangnya guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kapasitas SDM dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan *output* dan *outcome* yang dibutuhkan. SDM sangat penting, sehingga pengelolaan SDM harus dipastikan sebaik mungkin sehingga dapat

memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi (Handayani & Erlina, 2020).

Kompetensi adalah sifat atau bakat kerja yang terdiri dari komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tugas dan/atau tanggung jawab jabatan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pengembangan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga instansi pemerintah harus memiliki SDM yang kompeten. Jika pegawai pemerintah, terutama di sektor keuangan, tidak kompeten, hal ini akan mengakibatkan ketidakakuratan laporan keuangan dan kesalahan penyusunan, yang akan berdampak pada daerah (Azzahro dkk, 2023).

2.1.4 TAM (Technology Acceptance Model)

TAM digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku pengguna terhadap teknologi. Teori ini berfokus pada dua faktor utama, termasuk "kemudahan penggunaan" dan "kegunaan", untuk menjelaskan penerimaan teknologi. Dengan menerapkannya pada studi ini, TAM dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana pegawai di BPKPAD Kab. Demak menerima dan menggunakan langkah-langkah pengendalian keamanan informasi akuntansi dan pengendalian internal. Secara khusus, dengan mempelajari kegunaan dan kemudahan penggunaan langkah-langkah pengendalian ini, peneliti dapat menilai tingkat penerimaan di antara pegawai. Misalnya, jika suatu langkah pengendalian keamanan informasi akuntansi dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dan memberikan manfaat yang jelas dalam melindungi informasi, langkah tersebut akan sangat mudah diterima oleh pegawai (Nhan et.al, 2025).

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi suatu entitas pelapor, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas dalam periode waktu tertentu.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Suatu LKPD harus memenuhi persyaratan kualitatif agar dapat dikatakan berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di sejumlah tempat yang berkaitan dengan pembahasan dan dijadikan sebagai landasan dan pembanding dalam penelitian ini. Tabel 2 menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti, Sampel dan Obyek Penelitian	Variabel	Grand Theory	Teknik Analisis	Hasil
--	-----------------	---------------------	------------------------	--------------

<p>Gasperz (2019). Sampel dan Objek : 57 orang penata laporan keuangan meliputi PPK, PPSPM, staf keuangan, perlengkapan, pengembangan program (perencanaan) atau administrasi serta pegawai bidang teknis yang membuat laporan keuangan di Badan Pusat Statistik Daerah Maluku</p>	<p>Kompetensi SDM, SPIP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Teori Kontijensi (Contingency Theory)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>SPIP (+) Sig. Kompetensi SDM (+) Sig. Pemanfaatan TI (-) TS SPIP dan Kompetensi SDM berpengaruh positif sedangkan Pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>
<p>Raudhatinur, dkk (2023) Sampel dan Objek : 138 responden di SKPD Aceh</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Teori Stewardship</p>	<p>Moderated Regression Analysis (MRA) dengan SPSS 25</p>	<p>Kompetensi SDM (+) Sig. SPIP (+) Sig. Kompetensi SDM - KLKD → TI (+) Sig. SPIP - KLKD → TI (+) Sig. Kompetensi SDM dan SPIP berpengaruh terhadap KLKD TI memediasi hubungan antara Kompetensi SDM dan SPIP terhadap KLKD</p>
<p>Reu, dkk (2024) Sampel dan Objek : 106 responden di Kabupaten Ende</p>	<p>Kompetensi SDM, SPIP, Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>-</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>SPIP (-) TS Kompetensi SDM (-) TS SPIP-KLKD → Pemanfaatan TI (+) Sig. Kompetensi SDM- KLKD → Pemanfaatan TI (-) TS</p>

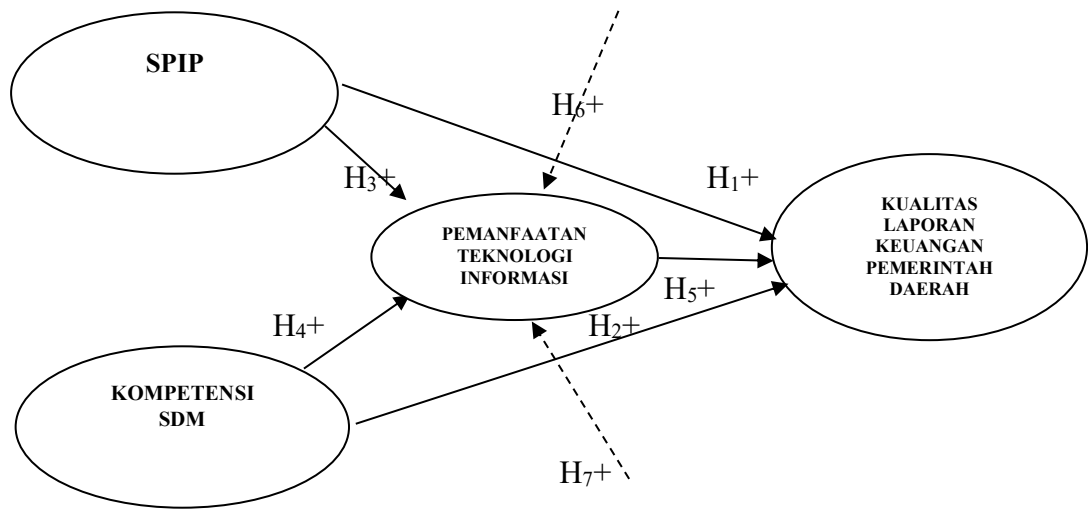
				<p>SPIP dan Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap KLKD</p> <p>Pemanfaatan TI dapat memediasi hubungan antara SPIP terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Pemanfaatan TI tidak dapat memediasi hubungan antara Kompetensi SDM terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>
<p>Khosisa, dkk (2025) Sampel dan Objek : seluruh pegawai sebanyak 33 orang di DPMPTSP Kabupaten Sumbawa</p>	<p>Laporan Keuangan Akrua, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan</p>	-	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>SPIP (+) Sig.</p> <p>SPIP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>
<p>Dreksi, dkk (2025) Sampel dan Objek : 36 OPD di Kabupaten Aceh Selatan</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Teori Keagenan (Agency Theory), Stewardship Theory, Resource-Based Theory</p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>SPIP (+) Sig.</p> <p>Pemanfaatan TI (-) TS</p> <p>SPIP berpengaruh positif sedangkan Pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>

Sumber: berbagai jurnal, 2025

2.2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel *intervening*. Dengan adanya SPIP yang efektif dan kompetensi SDM yang berkompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam penyusunan LKPD maka dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas LKPD agar mendapatkan opini WTP tanpa catatan.

Untuk menunjukkan hubungan variabel-variabel tersebut, bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal yang baik berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan pengendalian yang memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Roshida (2020) hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dengan tujuan diadakannya sistem pengendalian internal secara langsung pegawai lebih terbantu dalam hal menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sehingga pegawai akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan dan tata pemerintahan yang baik akan terwujud.

Penerapan SPIP yang optimal akan berimplikasi pada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SPIP harus menjalankan fungsinya dalam memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Demak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gasperz (2019), Khosisa (2025), dan Dreksi (2025) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.2 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SDM merupakan aset penting yang memerlukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan (Jalil, 2021). Kompetensi SDM yang tinggi, termasuk pengetahuan dan kemahiran dalam alur akuntansi, sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan jujur.

Landasan untuk mencapai kinerja tinggi dalam penyelesaian tugas adalah kompetensi. Orang yang berkompoten akan lebih cepat menyusun laporan keuangan karena sudah mengetahui dan memahami apa saja yang perlu dilakukan. Dengan mengoptimalkan kompetensi SDM maka kualitas transaksi keuangan daerah dapat ditingkatkan. Alhasil, laporan keuangan bisa selesai dan disampaikan sebelum batas waktunya (Agustiawan & Rasmini, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gasperz, 2019) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.3 Pengaruh SPIP terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, memastikan proses internal berjalan lancar, dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi antara SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi dapat memberikan pengaruh positif dan tingkat kepuasan pengguna terhadap laporan keuangan karena kualitas, akurasi, dan keakuratan data (Zulvia et., al 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reu dkk (2024) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : SPIP berpengaruh terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2.3.4 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Ratnasari et al., (2021) SDM adalah aset perusahaan yang sangat penting, sehingga peran dan fungsinya tidak dapat tergantikan oleh sumber daya lain. SDM ini merupakan indikator yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk kemajuan organisasi dan juga menjadi faktor penentu bagi keefektifan kegiatan dalam sebuah organisasi. SDM menggambarkan orang-orang yang produktif dan berperan sebagai motivator utama dalam organisasi, baik dalam bentuk bisnis maupun institusi.

SDM menjadi faktor kunci dalam penciptaan laporan keuangan yang bermutu. SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya bergantung pada jumlah SDM, melainkan juga pada kompetensi yang dimiliki oleh mereka. SDM juga harus menguasai teknologi informasi demi mencapai tujuan organisasi.

Temuan studi yang dilakukan oleh Gasperz (2019) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2.3.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. Urgensi dalam penelitian ini terletak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Demak. Kualitas laporan keuangan daerah yang semakin bermutu adalah dasar bagi pengambilan keputusan yang akurat, baik di sektor publik maupun swasta.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sonjaya & Muslim (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi Memediasi Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan otomatisasi banyak proses pengendalian, membuat sistem lebih efisien dan mengurangi kesalahan manusia. Dengan teknologi informasi, data keuangan dapat diakses dengan cepat dan lebih akurat, meningkatkan keandalan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai mediasi berarti bahwa pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan tidak akan maksimal tanpa dukungan teknologi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, sehingga memastikan bahwa kontrol internal berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Reu, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai mediasi berarti bahwa tanpa bantuan teknologi, dampak SPIP terhadap kualitas transaksi keuangan tidak akan maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, memastikan pengendalian internal beroperasi secara efektif dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan SPIP semakin efektif dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reu (2024) dan Raudhatinur dkk (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memediasi pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆ : Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memediasi pengaruh SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi Memediasi Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dan keandalan dalam mengoperasikannya. Teknologi informasi yang memadai memudahkan SDM dalam menjalankan sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten sehingga proses pengembangannya sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik kompetensi SDM dalam menjalankan sistem informasi, semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Teknologi informasi dapat memediasi SDM dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh SDM dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi informasi bisa meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri. Jika pemanfaatan teknologi informasi tidak memadai selama proses penyusunan maka kualitas laporan keuangan dapat menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raudhatinur dkk (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₇ : Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memediasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Adapun populasi penelitian ini adalah pegawai di BPKPAD Kabupaten Demak. Jumlah populasi sebanyak 60 (enam puluh) responden yang meliputi penata laporan keuangan meliputi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Staf Program dan Keuangan, Bendahara serta Staf Bidang Teknis yang membuat laporan keuangan.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini adalah anggota populasi yang terpilih menjadi responden. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau penyampelan dengan kriteria. Teknik *purposive sampling* dapat diartikan sebagai cara penarikan sampel nonprobabilitas yang mana unit yang akan diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan unit mana yang dianggap paling bermanfaat dan representatif.

Melihat dari teknik pengambilan sampel yang menggunakan *purposive sampling* maka terdapat kriteria untuk menentukan pengumpulan yaitu pegawai yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun. Kriteria tersebut digunakan berdasarkan *reason* bahwa pegawai yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun memiliki kompetensi yang cukup serta pemahaman yang memadai mengenai penyusunan

laporan keuangan sehingga diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 60 (enam puluh) responden yang diharapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan didistribusikan kuesioner kepada 60 (enam puluh) responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga simpulan yang diambil adalah benar. Oleh karena itu dalam penelitian ini, metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode angket (kuesioner).

Dalam melakukan pengukuran suatu variabel, peneliti menggunakan skala *likert* sebagai alat untuk mengukur variabel yang dijadikan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala *Likert* digunakan untuk menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju dari responden mengenai berbagai pertanyaan mengenai perilaku, objek, orang, atau kejadian.

Dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 7 titik. Angka 1 menunjukkan pendapat “sangat tidak setuju sekali (SSTS)” sampai dengan angka 7 yang menunjukkan pendapat “sangat setuju sekali (SSS)” (Ferdinand, 2006). Skala 7 poin dianggap mampu memberikan rentang variasi jawaban yang lebih luas dibandingkan skala 5 poin sehingga responden dapat mengekspresikan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka dengan lebih detail (Finstad, 2010). Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa skala dengan jumlah kategori lebih banyak, seperti 7 poin, cenderung menghasilkan reliabilitas dan validitas yang lebih tinggi dibandingkan skala yang lebih sempit (Kusmaryono dkk, 2022).

3.4 Definisi Konsep Variabel Penelitian

3.4.1 SPIP

Pengendalian internal mengacu pada suatu proses yang penting dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, permintaan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Ayem & Kusumasari, 2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel SPIP dalam penelitian ini adalah COSO (2013) yang tampak seperti tabel berikut:

Tabel 3. Indikator SPIP

Variabel	Indikator
SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern

Sumber: COSO, 2013

3.4.2 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Dengan demikian, SDM yang kompeten dan memiliki keterampilan serta pengetahuan dalam mengolah informasi akan menghasilkan lembar kerja yang bernilai dan berkualitas tinggi (Raudhatinur dkk, 2024). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi SDM dalam penelitian ini adalah Xu dkk (2003) yang tampak seperti tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kompetensi SDM

Variabel	Indikator
Kompetensi SDM	1. Pemahaman tentang akuntansi 2. Sumber daya yang memadai 3. Peran dan tanggungjawab 4. Pelatihan keahlian dalam tugas 5. Sosialisai peraturan baru

Sumber: Xu dkk, 2003

3.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mengacu pada tingkat integritas teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. Konstruksi teknologi informasi didasarkan pada indikator yang berfungsi sebagai pengukur efektivitas penggunaan teknologi informasi meliputi perangkat lunak, keras, dan jaringan sistem. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel teknologi informasi dalam penelitian ini adalah sesuai Tanaamah dkk (2021) yang tampak seperti tabel berikut:

Tabel 5. Indikator Pemanfaatan TI

Variabel	Indikator
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Ketersediaan Teknologi Informasi 2. Kemudahan Akses dan Penggunaan 3. Dukungan terhadap Efisiensi Kerja 4. Kesesuaian TI dengan Tugas

Sumber: Tanaamah, 2021

3.4.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan mencakup ketidaksesuaian informasi, ketepatanwaktuan informasi, informasi andal atau dapat dipercaya, serta kemampuan untuk membandingkan dan membedakan informasi dalam laporan keuangan Fransiska et al (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan dimensi normatif yang harus disertakan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) yang tampak seperti tabel berikut:

Tabel 6. Indikator KLKPD

Variabel	Indikator
KLKPD	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan

Sumber: Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010

3.5 Alat Analisis

Teknik analisis data adalah teknik mengolah/mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru. Teknik analisis data dimulai dari mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menabulasi data berdasarkan variabel dari semua responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, menghitung untuk menjawab rumusan masalah (Budiman, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan program *WarpPLS* versi 7.0 karena dapat menguji hubungan yang kompleks dengan banyak konstruk dan banyak indikator (Ghozali, 2020). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 1) Penyusunan Deskripsi Statistik; 2) Penyusunan Model Persamaan Struktural; 3) Evaluasi Model Pengukuran; dan 4) Evaluasi Model Struktural.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif dengan tujuan untuk merangkum sampel. Menurut Roshida (2020) statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif misalnya penyajian data melalui tabel dan perhitungan frekuensi.

3.5.2 Model Persamaan Struktural

Adapun model persamaan struktural dalam penelitian ini yaitu:

1) Persamaan Struktural I

$$\eta_1 = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \zeta$$

Keterangan:

- η_1 = konstruk laten endogen pemanfaatan teknologi informasi
- γ_1 = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen SPIP terhadap konstruk laten endogen pemanfaatan teknologi informasi
- γ_2 = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen kompetensi SDM terhadap konstruk laten endogen pemanfaatan teknologi informasi
- ξ_1 = konstruk laten eksogen SPIP
- ξ_2 = konstruk laten eksogen kompetensi SDM
- ζ = error model

2) Persamaan Struktural II

$$\eta_2 = \gamma_3 \xi_1 + \gamma_4 \xi_2 + \beta_1 \eta_1 + \zeta$$

Keterangan:

- η_2 = konstruk laten endogen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- γ_3 = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen SPIP terhadap konstruk laten endogen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- γ_4 = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen Kompetensi SDM

		terhadap konstruk laten endogen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
β_1	=	koefisien pengaruh konstruk laten endogen pemanfaatan teknologi informasi terhadap konstruk laten endogen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
ξ_1	=	konstruk laten eksogen SPIP
ξ_2	=	konstruk laten eksogen kompetensi SDM
η_1	=	konstruk laten endogen pemanfaatan teknologi informasi
ζ	=	error model

3.5.3 Pengujian Model Penelitian

Pengujian model penelitian ini meliputi pengujian pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan pengujian pengaruh variabel mediasi. Dalam melakukan pengujian pengaruh variabel mediasi digunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Zhao, Lynch, dan Chen (2010). Pendekatan ini membagi pengaruh mediasi menjadi *nonmediation* dan *mediation*. Terdapat 2 (dua) jenis *non mediation* dan 3 (tiga) jenis *mediation*. Adapun 2 (dua) jenis *nonmediation*, yaitu:

1. *Direct-only nonmediation*
Pengaruh langsung signifikan tetapi pengaruh tidak langsung tidak signifikan.
2. *No-effect nonmediation*
Pengaruh langsung dan tidak langsung tidak signifikan.

Sedangkan 3 (tiga) jenis *mediation*, yaitu:

1. *Complementary mediation*
Pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung signifikan dan menunjuk arah yang sama.
2. *Competitive mediation*
Pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung signifikan dan menunjuk arah yang berlawanan. *Competitive mediation* disebut juga dengan *inconsistent mediation*.
3. *Indirect-only mediation*
Pengaruh tidak langsung signifikan tetapi pengaruh langsung tidak signifikan. Situasi ini merupakan skenario terbaik karena mediator sepenuhnya sesuai dengan kerangka teori yang dihipotesiskan.

3.5.4 Evaluasi Model Pengukuran

Dalam rangka pengujian model penelitian ini digunakan *Variance Based SEM* (VB SEM) atau PLS (*Partial Least Square*) dengan *software WarpPLS 7.0*. Adapun tahapan pengujian model penelitian berpedoman pada Hair, *et. al.* (2017), yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Evaluasi Model Pengukuran meliputi Evaluasi Model Pengukuran Formatif dan Evaluasi Model Pengukuran Reflektif. Evaluasi Model Pengukuran Formatif diterapkan jika variabel penelitian merupakan variabel formatif, sedangkan Evaluasi

Model Pengukuran Reflektif diterapkan jika variabel penelitian merupakan variabel reflektif. Dikarenakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel reflektif maka evaluasi model pengukurannya menerapkan evaluasi model pengukuran reflektif. Dalam evaluasi model pengukuran reflektif terdapat 3 (tiga) kriteria yang akan menjadi pedoman interpretasi yaitu:

- a. Validitas Konvergen;
- b. Validitas Diskriminan; dan
- c. Reliabilitas.

Adapun kriteria dan *rule of thumb* evaluasi model pengukuran reflektif pada Model PLS menurut Ghozali (2020) ditabulasikan dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Kriteria dan *Rule of Thumb* Evaluasi Model Pengukuran Reflektif

Uji Model	Kriteria	Rule of Thumb
Evaluasi Model Pengukuran Reflektif (<i>Outer Model</i>)	a. Validitas Konvergen	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) untuk setiap variabel harus $> 0,50$
	b. Validitas Diskriminan	Nilai akar kuadrat AVE untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi antar variabel
	c. Reliabilitas	Reliabilitas disebut baik jika <i>composite reliability</i> $\geq 0,70$.

3.5.5 Evaluasi Model Struktural

Setelah dilakukan evaluasi model pengukuran reflektif yang bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator penelitian, dilakukan evaluasi model struktural. Dalam evaluasi model struktural terdapat 2 (dua) kriteria yang akan menjadi pedoman interpretasi yaitu: a) Koefisien Determinasi; dan b) Signifikansi Hubungan Jalur. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa kuat model penelitian mampu menggambarkan variansi pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Sedangkan Signifikansi hubungan jalur merupakan pengujian hipotesis yaitu pengujian pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen maupun variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya. Melalui pengujian signifikansi jalur tersebut bisa diketahui pula apakah suatu variabel merupakan variabel mediasi atau bukan variabel mediasi dengan menggunakan pendekatan Zhao, Lynch dan Chen (2010). Adapun kriteria dan *rule of thumb* evaluasi model struktural pada Model PLS menurut Ghozali (2020) ditabulasikan dalam Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Kriteria dan *Rule of Thumb* Evaluasi Model Struktural

Uji Model	Kriteria	Rule of Thumb
Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	a. Koefisien Determinasi (R^2)	$(R^2) \leq 0,70$ disebut model kuat, $R^2 \leq 0,45$ disebut model moderat, dan R^2 sebesar $\leq 0,25$ disebut model lemah
	b. Uji <i>Partial F-test</i> (<i>Effect Size</i>)	Klasifikasi <i>Effect Size</i> sebagai berikut: lemah (0,02), medium (0,15), dan besar (0,35).
	c. Uji <i>Relevansi Prediktif</i> (Q^2)	Klasifikasi Q^2 sebagai berikut: $Q^2 > 0$ maka memiliki relevansi prediktif; $Q^2 < 0$ maka kurang memiliki relevansi prediktif
	d. Signifikansi Hubungan Jalur	P-Value $< 0,025$ (Level Signifikansi = 2,5%)

